



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI DESA JALARANG KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

Dede Kholil

Universitas Galuh, Ciamis Indonesia

Kiki Endah

Universitas Galuh, Ciamis Indonesia

Asep Nurwanda

Universitas Galuh, Ciamis Indonesia

Korespondensi penulis : dedekholil33@gmail.com

Abstrak Pemberdayaan merupakan langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, berarti kecukupan secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir dapat diartikan bahwa seseorang berhak memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, terpenuhinya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, dan kesehatan. Sejahtera secara batin, seseorang memperoleh kebahagiaan, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut, ancaman dan bebas mengemukakan pendapat dimuka umum. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui fenomena partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Jalatrang. Penelitian berfokus pada pengumpulan informasi berdasarkan kondisi masyarakat, bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang lebih akurat. Hal ini terdiri dari empat prinsip: 1) Bina Manusia 2) Bina Usaha 3) Bina Lingkungan 4) Bina Kelembagaan. Namun, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya, rendahnya pendidikan atau keterampilan, serta perubahan iklim yang dapat mengancam hasil pertanian. Melalui pemberdayaan yang tepat, masyarakat dapat lebih mandiri dalam menghadapi masalah pangan, sehingga ketahanan pangan di Desa Jalatrang dapat terjaga dengan baik, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi Masyarakat. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum terlaksana secara optimal dengan melihat belum optimalnya pengembangan sarana kelompok tani untuk mendukung ketahanan pangan menjadi lebih maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa belum sepenuhnya membantu dalam memberikan bantuan dalam hal pembangunan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Masyarakat, Ketahanan Pangan, Desa Jalatrang*

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat. Suharto (dalam Widiastuti, 2015:39) berpendapat bahwa pemberdayaan pada intinya adalah memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri. Dalam arti lain, memampukan seseorang untuk menjadi sejahtera.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan

komunitasnya menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu kadang tidak bisa berkembang karena disebabkan faktor-faktor tertentu.

Dalam pemberdayaan, masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan satu pihak menaruh kepedulian untuk memberdayakan (pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat) peduli pada perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi (Kiki Endah et al., 2024)

Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Anthony (2000:12), “Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat”.

Pemberdayaan masyarakat terutama sektor ketahanan pangan maka dibutuhkan peran Pemerintah Desa. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal, bahwa: Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kehadiran Undang-Undang tersebut memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa. Pasalnya dijelaskan bahwa pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu melaksanakan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada pemerintah Desa, peneliti menemukan permasalahan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis belum optimal, permasalahan tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut;

1. Akses terbatas terhadap pertanian modern, salah satu penyebab utama dari rendahnya adopsi teknologi pertanian adalah keterbatasan informasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Misalnya, banyak petani yang tidak mendapatkan pelatihan atau informasi mengenai penggunaan alat pertanian modern seperti traktor atau sistem irigasi otomatis, yang dapat meningkatkan hasil panen mereka.
2. Kurangnya pengetahuan tentang praktik pertanian berkelanjutan menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah minimnya pelatihan atau sosialisasi mengenai pertanian ramah lingkungan dan teknik bertani yang efisien. Misalnya, banyak petani yang belum familiar dengan metode pertanian organik atau penggunaan pupuk alami yang dapat meningkatkan kesuburan tanah tanpa merusak lingkungan.

3. Ketergantungan pada pola tanam tradisional menjadi tantangan besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian di masyarakat. Banyak petani masih menanam jenis tanaman yang sama setiap musim, seperti padi atau jagung, tanpa mencoba pola tanam yang lebih bervariasi yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan mereka. Misalnya, petani terus-menerus menanam padi tanpa mempertimbangkan rotasi tanaman atau diversifikasi dengan tanaman hortikultura yang lebih menguntungkan, seperti sayuran atau buah-buahan.

Kajian Pustaka

Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata “*empowerment*”. Menurut Mernam Webster dan Oxford English Dictionary (dalam Adisasmito, 2014:151) kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: 1) *to give power* atau *authority* atau memberi kekuasaan, mengalihkan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2) *to give ability* atau *to enable* atau usaha untuk memberikan kemampuan. Dalam pengertian kedua kata tersebut, pemberdayaan diartikan memberi kemampuan atau keberdayaan kepada pihak lain yang tidak berdaya. Kata *empowerment* berasal dari kata dasar *empower* yang berarti *to invest with power, especially legal power or official authority* atau *to equip or supply with an ability*. Jadi pemberdayaan diartikan menguasai, memberikan kuasa atau memberi wewenang sehingga menjadi obyek yang berkuasa. Dalam pemberdayaan terjadi proses yang mendorong dan meyakinkan masyarakat untuk memperoleh keterampilan, kemampuan dan kreativitas (Widanti, 2011:44). Hulme dan Turner (dalam Adisasmito, 2014:152) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Pemberdayaan masyarakat hakikatnya merubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat (Anwas, 2013:3). Menurut Psinos dan Smithson (dalam Greasley, 2004:354-368) pemberdayaan adalah sebuah persepsi dan keyakinan, sebuah posisi yang dimiliki oleh peneliti yang mengambil perspektif pengalaman pada arti pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan sebuah pengalaman peneliti yang diyakini dapat memberikan daya dan kekuatan kepada masyarakat yang lemah dalam masyarakat untuk menimbulkan rasa percaya diri dan pengalaman masyarakat dalam mengatasi permasalahan. Begitu juga Suparjan dan Hempri Suyatno (2003:44) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang tidak

dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah batasan waktu dan dana. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan adanya kesadaran masyarakat (*community awareness*).

Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari Undang-Undang 2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan "pengkayaan cakupan" dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan "perorangan" dan "sesuai keyakinan agama" serta "budaya" bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Ketahanan pangan seringkali diartikan dengan tercukupinya pasokan beras pada suatu negara. Hal ini karena beras sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat pada suatu negara. Padahal menurut Triyono (2013: 16), bahwa ketahanan pangan pada hakekatnya adalah "Terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat baik dari sisi ketersediaan, stabilitas, dan akses". Pendapat ini diperkuat oleh FIVIMS dalam Suharyanto (2011: 186-187) yang menyatakan ketahanan pangan adalah suatu keadaan dimana semua orang pada setiap waktu memiliki akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selernya (*food preferences*) demi menunjang kehidupan yang sehat dan aktif. Menurut Menurut dua definisi ini dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan kondisi ketika masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pangan yang cukup, aman dan bergizi. Dengan kata lain, semua masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan.

Ketahanan pangan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu dari segi makro dan segi mikro. Hal ini sejalan dengan pandangan Fatah (2006: 174) yang menyebutkan bahwa: Ketahanan dapat ditinjau dari segi makro (nasional) maupun mikro (rumah tangga). Secara makro dapat diartikan tersedianya pangan yang cukup (volume, keragaman, mutu, gizi, keterjangkauan) bagi penduduk, di seluruh wilayah, setiap saat. Secara mikro dapat diartikan sebagai kemampuan mengakses pangan dan gizi sesuai kebutuhan dan pilihan, setiap saat, untuk tubuh sehat dan produktif.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2012: 4), yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Jalatrang secara mendalam. Fokus penelitian diarahkan pada perolehan informasi nyata sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga hasil yang didapatkan lebih menekankan makna daripada sekadar penalaran.

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2017:4) mendefinisikan bahwa, “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode penelitian kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek peneliti (Moleong, 2017:44).

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Metode ini dipilih karena cocok dengan masalah yang diangkat dengan pendekatan kualitatif, dan data yang ingin peneliti dapatkan ini membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan judul penelitian ini dengan berupa kalimat naratif yang menjelaskan apa adanya mengenai subjek dan objek yang diteliti yang bukanlah berupa angka-angka.

Data dan Sumber Data

Data penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Sebagaimana dikemukakan oleh Lofland dan lofland (1984:47) yang (Moleong, 2014: 1570) yaitu: “*Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik*”.

Data primer adalah informasi yang diperoleh pertama kali oleh peneliti menyangkut variabel yang menjadi tujuan utama penelitian. Data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen hasil observasi, wawancara, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Berikut informasi yang diinginkan dari informan yang relevan dengan

penelitian. Data Primer Menurut Indriantoro dan Supomo (2001:146), bahwa “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)”.

Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan. Adapun sumber data primer yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Wakil Ketua LPMD, PPL, Ketua Kelompok Tani, dan masyarakat sebagai petani.

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber- sumber yang telah ada. Data sekunder diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data Sekunder Menurut Indriantoro dan Supomo (2001:146), bahwa “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2012: 224) mengatakan bahwa: 'teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2012:248) mengemukakan bahwa Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conculsion drawing/verification* (Verifikasi Data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan merupakan langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera berarti kecukupan secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir dapat diartikan bahwa seseorang berhak memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, terpenuhinya kebutuhan pangan (makan),

sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, serta kesehatan. Sejahtera secara batin seseorang memperoleh kebahagiaan, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut, ancaman dan bebas mengemukakan pendapat dimuka umum.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisi saat ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri (Endah, 2020)

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu kadang tidak bisa berkembang karena disebabkan faktor-faktor tertentu. Adapun teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan masyarakat oleh Sumadyo dan Mardikanto (2012:114-116) yang didalamnya mengemukakan dimensi-dimensi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Bina Manusia 2) Bina Usaha 3) Bina Lingkungan 4) Bina Kelembagaan. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis dengan narasumber sejumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa (informan 1), 1 Bhabinkamtibas (informan 2), 1 Wakil Ketua LPMD (informan 3), 1 orang PPL (informan 4), 1 orang ketua kelompok tani (informan 5), 1 orang petani (informan 6)

BinaManusia

Berdasarkan hasil observasi dapat peneliti ketahui bahwa Pemerintah Desa sudah melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan khususnya kepada masyarakat yang ingin menggarap lahan untuk bercocok tanam lewat sekolah lapang pertanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Jalatrang yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Lalu Pemerintah Desa sudah cukup optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pemerintah desa memberikan beberapa kali pelatihan tentang ketahanan pangan.

Tidak terdapat hambatan dalam mengimplementasikan kegiatan pelatihan dan penyuluhan, karena Pemerintah Desa telah memberikan pelatihan dan telah diikuti oleh masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Mardikanto dan Soebianto (2013:114) menyatakan bahwa “dalam ilmu manajemen manusia menempati unsur yang paling unik, yaitu selain sebagai sumber daya sekaligus sebagai pelaku dan pengelola manajemen itu sendiri”. Dengan begitu dapat peneliti simpulkan sesuai dengan teori tersebut maka dalam mengimplementasikan Bina Manusia di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis berjalan baik karena Pemerintah Desa memberikan pelatihan ataupun penyuluhan yang cukup untuk petani atau masyarakat.

Bina Usaha

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat peneliti simpulkan bahwa pengembangan produk unggulan Desa Jalatrang sudah terfokus pada pengolahan makanan berbahan dasar ubi ungu sebagai komoditas lokal, dengan berbagai variasi produk untuk memperkuat branding desa. Selain itu peran Pemerintah Desa dalam penyaluran produk sudah cukup optimal melalui keterlibatan sektor swasta serta pemanfaatan tempat penyaluran dan pemasaran yang dimiliki desa sendiri.

Menurut Nurrohmah, (2015:20) “Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan dalam usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi sesuai dengan teori tersebut maka pengembangan kemampuan usaha di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah ada dan berjalan baik, dapat dilihat bahwa peran Pemerintah Desa dalam membantu pengembangan usaha dirasa sudah cukup dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan.

Bina Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan cukup optimal dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian sumber daya alam. Hal itu dapat dilihat dari adanya sosialisasi tentang pemanfaatan sumber daya secara efektif.

Jones (2001) mengemukakan: Seseorang atau lembaga dapat dinilai membuat keputusan atau bertindak etis bila: 1) Keputusan atau tindakan dilakukan berdasarkan nilai atau standar yang diterima dan berlaku pada lingkungan organisasi yang bersangkutan. 2) Bersedia mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada seluruh pihak yang terkait. 3) Yakin orang lain akan setuju dengan keputusan tersebut atau keputusan tersebut mungkin diterima dengan alasan etis. Program bina lingkungan merupakan bentuk kepedulian perusahaan pada lingkungan sekitarnya dan telah diatur dalam UU no 40 Perseroan Terbatas.

Berdasarkan wawancara dan observasi sesuai dengan teori tersebut maka mengenai pelaksanaan dalam bina lingkungan sudah cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Desa telah melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat sekitar dan melibatkan instansi terkait.

Bina Kelembagaan

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa belum sepenuhnya melakukan peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas produk pangan, karena masih terdapat beberapa kelompok tani yang belum memiliki tempat untuk pengembangan kelompok yang akhirnya menggunakan fasilitas lain atau tempat lain sebagai alternatif.

Menurut Syamsu, (2011) menjelaskan bahwa: Kelompok yang kuat dan lestari, mendapat pengakuan dari pihak lain mendapat bantuan/kredit dari donasi/kreditor dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam proses memperbesar skala usaha tani. Kelompok yang mandiri dan berkesinambungan, lebih leluasa untuk merencanakan setiap langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengkomunikasikan (dan memasarkan) hasil produksi.

Berdasarkan wawancara dan observasi sesuai dengan teori tersebut maka mengenai pelaksanaan peningkatan kualitas kelompok belum cukup optimal . Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya beberapa kelompok wanita tani yang belum memiliki tempat sendiri untuk pengembangan kelompok dan ketahanan pangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan bahwa secara umum peran Pemerintah Desa dalam empat dimensi tersebut telah berjalan dengan baik. Dari indikator-indikator yang menjadi acuan dalam dimensi tersebut sebagian besar telah dijalankan dengan cukup optimal. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ketahanan pangan dan kelompok tani. Namun demikian, masih terdapat satu indikator yang belum berjalan secara maksimal, yaitu terkait penguatan kelompok dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung ketahanan pangan menjadi maksimal. Dibuktikan dengan masih ditemukannya beberapa kelompok tani yang belum memiliki tempat atau fasilitas sendiri untuk mendukung kegiatan pengembangan kelompok, sehingga upaya peningkatan ketahanan pangan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa perlu meningkatkan dukungan, khususnya dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai bagi seluruh kelompok tani agar tujuan penguatan ketahanan pangan di Desa Jalatrang dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan. Upaya yang bisa dilakukan ialah Pemerintah Desa dapat menambah alokasi dana untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat khususnya ketahanan pangan dan menyusun perencanaan pembangunan fasilitas kelompok tani secara bertahap berdasarkan skala prioritas, wilayah atau kelompok tani yang paling membutuhkan dapat didahulukan sambil tetap menyiapkan rencana jangka panjang untuk seluruh kelompok. Selanjutnya Pemerintah Desa memberikan pelatihan dan pembinaan kelompok tani agar memiliki kemampuan manajerial dan kelembagaan yang kuat, sehingga mampu mengelola bantuan sarana dan prasarana secara mandiri serta mengakses berbagai program pemerintah atau kemitraan secara aktif juga tidak lupa harus ada evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program termasuk mendengar umpan balik dari kelompok tani, agar hambatan-hambatan dapat diatasi dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N., & David, W. Y., 2000, "Management Control in Nonprofit Organization", 6th ed., Boston : Irwin Mc Graw-Hill Inc.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN
DI DESA JALARANG KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS**

- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ayu Aisyah Putri (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Produk Unggulan Desa Di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta
- Gilbert, Jones. 2001. *E-Learning*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- Chasan, P. N., & Choiriyah, I. U. (n.d.). *Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) pada Program Ketahanan Pangan di Wisata Buah*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Kiki Endah (2020). *Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa*. *Jurnal Moderat*. 6(1), 135-143.
- Indah Reski, M. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*. *Skripsi*.
- Adisty K, endah K, & sujai. (2024). 11.+Keny+Karina. *Jurnal OTONOMI*, 1(September), 112–113.
- Endah, K. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.